
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk Indonesia pada tahun 2005 diperkirakan berjumlah lebih dari 220 juta jiwa. Jumlah tersebut terbesar keempat di dunia setelah RRC, India dan Amerika Serikat. Penduduk Indonesia tersebar di 13.677 pulau, dan 70 persen diantaranya bermukim di desa, bekerja di sektor pertanian. Setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda dilihat dari segi sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia, khususnya tingkat pendidikan dan pendapatan. Oleh karena itu masalah yang dihadapi oleh penduduk Indonesia sangat beragam, yaitu rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran dan kemiskinan.

Laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi mengakibatkan luas lahan yang diolah untuk pertanian semakin terbatas. Terbatasnya luas lahan mengakibatkan semakin sempit lahan garapan bagi petani. Hal ini berdampak luas antara lain menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan penduduk, anak-anak petani tidak dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, tidak ada investasi, dan tidak ada jaminan sosial terhadap keluarga serta semakin menguatnya arus urbanisasi ke kota. Akibat yang lebih parah kini masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang

dan papan secara optimal. Kondisi di atas sebagai gambaran proses kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Salah satu implikasi utama sekaligus faktor penyebab rendahnya taraf hidup di negara-negara berkembang adalah keterbatasan penyerapan sumberdaya manusia (*human resources*). Akibat tingkat pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi sementara pertumbuhan kesempatan kerja terbatas, sehingga timbul pengangguran. Menurut Todaro (2000:69) "Dengan mempertimbangkan tingkat kelahiran yang terjadi di negara-negara berkembang dewasa ini, maka dapat dipastikan bahwa penawaran tenaga kerja di negara-negara dunia ketiga akan meningkat, di kemudian hari yang mengakibatkan berbagai masalah pengangguran, kemiskinan dan pendidikan suram". Menurut Gregorius Sahdan (2005):

Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk (1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) hak rakyat untuk berinovasi; (10) hak rakyat untuk menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan; dan (11) hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik.

Bila dilihat dari ukuran *Human Development Indeks* (Kompas 25, Agustus 2004), ternyata Indonesia hanya menempati urutan ke 111 dari 177 negara. Hal ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan

kualitas manusia Indonesia relatif masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara lain. Masalah ini dapat diatasi dengan adanya pola pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Magantas Tampubolon (2000) mengungkapkan bahwa "Pola pembangunan masyarakat yang dibutuhkan bukan kegiatan yang sifatnya *top-down intervention* tetapi yang sifatnya *bottom-up intervention* yang menghargai dan mengakui bahwa masyarakat lapisan bawah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahan, dan mampu melakukan usaha-usaha produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan". Suryana (2000:1) mengungkapkan bahwa

Usaha-usaha pembangunan yang sedang giat dilaksanakan oleh negara-negara sedang berkembang (*developing countries*) di dunia pada umumnya berorientasi kepada bagaimana memperbaiki atau mengangkat taraf hidup (*level of living*) masyarakat di negara-negara tersebut agar mereka dapat hidup seperti di negara maju (*develop countries*)".

Fokus kajian IPS adalah gejala dan masalah sosial, sedangkan metode dan konsep-konsep yang digunakan untuk mengenal, memahami, menganalisis, menafsirkan, dan memilih alternatif penyelesaiannya diadaptasi atau ditarik dari ilmu-ilmu lainnya. Menurut Nursid (1980:18) "karena itu pengetahuan sosial dapat diartikan sebagai studi mengenai interelasi ilmu-ilmu sosial dalam menelaah gejala dan masalah sosial yang terjadi di masyarakat". Lebih lanjut dikemukakan oleh Awan Mutakin (1994:65) ilmu-ilmu sosial memiliki beberapa pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Fungsional (*functional approach*), pengkajian suatu masalah sosial dengan menggunakan konsep-konsep yang didominasi oleh salah satu disiplin ilmu sosial, sedangkan konsep-konsep dari disiplin ilmu lainnya hanya berperan sebagai penunjang.
2. Pendekatan Interdisipliner (*interdisciplinary approach*), pengkajian suatu masalah sosial yang tidak dapat didominasi oleh konsep-konsep dari salah satu disiplin ilmu sosial, tetapi membutuhkan konsep-konsep dari sejumlah ilmu sosial secara berimbang.
3. Pendekatan multidisipliner (*multidisciplinary approach*), pengkajian masalah sosial yang selain membutuhkan konsep-konsep dari sejumlah ilmu sosial tetapi juga dari ilmu-ilmu lainnya.

Ilmu ekonomi merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Sosial, oleh karena itu kajian ilmu ekonomi tidak dapat lepas dari ilmu sosial yang lain, seperti sosiologi, psikologi, geografi, sejarah, hukum dan politik atau dengan kata lain memerlukan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner.

Dalam ilmu ekonomi dipelajari tentang bagaimana upaya manusia mencapai kepuasan hidup. Agar kepuasan tersebut terpenuhi, manusia harus melakukan kegiatan ekonomi (bekerja/berproduksi) dan menghasilkan alat pemuas kebutuhan (barang dan jasa) atau uang. Jika kebutuhan hidup tersebut telah terpenuhi, niscaya manusia akan mencapai kepuasan hidup. Demikianlah proses pemenuhan kebutuhan hidup terus berjalan selama manusia masih hidup. Dalam kenyataan, proses pemenuhan kebutuhan hidup tidak berjalan mulus, kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi, akibatnya muncul masalah ekonomi seperti yang diungkapkan di atas.

Pembangunan masyarakat merupakan suatu proses peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumberdaya. Pembangunan didorong untuk meningkatkan kemandirian mereka dalam mengembangkan kehidupan mereka sendiri. Istilah *community development* mengkaji berbagai proses pembangunan yang berlangsung di masyarakat. Istilah tersebut semakin mengemuka tidak hanya di kalangan praktisi pengembangan masyarakat yang umumnya dipelopori oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tetapi juga juga dikalangan para pengusaha.

Meskipun terdapat beragam pemaknaan terhadap *community development*, namun secara sederhana istilah tersebut dapat diringkas sebagai sebuah proses yang memacu masyarakat agar lebih bertanggung jawab atas dirinya, mampu mengorganisasi dan membuat perencanaan, mengembangkan berbagai pilihan yang mampu memotivasi memberdayakan diri sendiri, untuk mengurangi kebodohan, kemiskinan, dan kelaparan serta, menciptakan lapangan kerja.

Program pembangunan masyarakat dilakukan oleh berbagai sektor dan departemen diantaranya oleh pihak Perum Perhutani sebagai perwujudan dari suatu proses sosial, karena proses sosial merupakan bagian dari rencana pembangunan, sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Conyers (1992:15) sebagai berikut :

Untuk tujuan perencanaan, maka bidang kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang

terorganisasi, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memungkinkan individu, kelompok serta masyarakat untuk memperbaiki keadaan mereka sendiri, menyesuaikan diri terhadap kondisi yang ada dan berpartisipasi dalam tugas-tugas pembangunan. Kegiatan semacam ini tentunya membutuhkan keterampilan khusus misalnya dalam hal sosial, hubungan masyarakat serta pendidikan formal.

Menurut Corten (1990:110) pembangunan yang berorientasi kerakyatan adalah "tersentuhnya aspek-aspek keadilan, keseimbangan, sumberdaya alam dan adanya partisipasi masyarakat". Pada masa lalu pengelolaan hutan dilakukan oleh masyarakat cukup dengan hanya meminta ijin kepada pihak perhutani untuk mengelolanya.

Pada saat itu petani melakukan penanaman dengan cara tumpang sari, tetapi lama kelamaan cara yang dilakukan malah menjadikan adanya perambahan hutan dan perusakan hutan. Menurut data dalam satu malam, kekayaan hutan yang hilang nilai nominalnya sama dengan Rp. 18.000.000. Akhirnya pada tahun 2000, ada Peraturan Menteri Kehutanan yang melarang melakukan pengelolaan hutan dengan cara tumpang sari dan sekaligus mencanangkan bahwa seluruh hutan yang ada di Jawa Barat adalah hutan lindung bukan hutan produksi. Pertamakali diwujudkan di Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan yang bekerjasama dengan Perum Perhutani RPH BKPH Pangalengan KPH Bandung Selatan II Jawa Barat.

Sekitar 50 orang petani dan kini sudah berkembang jumlahnya menjadi 72 anggota penggarap, petani tersebut difasilitasi untuk

membuat sebuah Kelompok Tani Hutan (KTH). Kelompok ini kemudian bersama-sama membuat perencanaan untuk mengelola areal hutan yang sudah dibuka termasuk upaya pencegahan terhadap perluasan areal kerusakan hutan. Meskipun jumlah ini terlalu kecil untuk ukuran kawasan hutan yang ada, namun dengan adanya upaya ini menunjukkan keinginan pengelolaan kawasan hutan memberikan manfaat dan keuntungan yang besar bagi masyarakat di sekitar hutan.

Community development tidak selalu muncul sebagai suatu bentuk respons terhadap sebuah masalah atau krisis, *community development* juga dapat dipandang sebagai upaya penguatan keterampilan masyarakat dalam mengelola kehidupannya dan meningkatkan kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya dan peluang yang ada. Pendekatan *community development* ditetapkan di masyarakat antara lain keinginan untuk membangun hubungan yang kuat antarelement masyarakat, keinginan untuk mengembangkan potensi ekonomi wilayah seperti membentuk koperasi, kelompok petani mandiri, dan keinginan untuk mengatasi masalah yang muncul di wilayahnya.

Berdasarkan konsep dan pendekatan *community development* apakah selama ini program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya Perhutani telah memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Pulosari Pangalengan.



B. Rumusan Masalah.

Masalah yang akan dijadikan topik penelitian secara difokuskan pada kajian terhadap persoalan **“Program Pembangunan Masyarakat (*Community Development*) Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup penduduk (Studi Evaluasi melalui Proses Sosial Masyarakat Desa Hutan di Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan)”**

Secara khusus masalah yang akan diteliti difokuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kondisi masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan program pembangunan masyarakat di Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan?
2. Program-program apakah yang dilakukan oleh Perum Perhutani dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat?
3. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat program pembangunan masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan?

Penelitian ini khusus dilakukan pada kasus tertentu, yaitu para petani hutan yang berada di lingkungan Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan. oleh karena itu sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian kualitatif, hasil-hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada

populasi lain, tetapi lebih ditujukan untuk menggambarkan kebenaran yang terjadi di lapangan saat ini.

C. Verifikasi Konsep

Untuk menghindari terjadinya salah tafsir terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka penulis mencoba menguraikannya sebagai berikut :

1. Pembangunan Masyarakat (*Community Development*)

Terdiri dari dua konsep yaitu “ pembangunan” dan “masyarakat” secara singkat, pengembangan atau pembangunan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, bidang-bidang pengembangannya meliputi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya (Mayo : 1998 : 13). Pembangunan masyarakat adalah kegiatan yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan, sehingga masyarakat menjadi mandiri dan kualitas kehidupannya menjadi lebih baik, dengan demikian *community development* adalah sebuah proses sosial di mana manusia dapat menjadi lebih kompeten untuk hidup dan mempunyai sejumlah kontrol atas sumberdaya lokal.

2. Kualitas Hidup.

Kualitas hidup dapat diartikan bahwa masyarakat memiliki ketrampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan dalam



memasuki dunia kerja, baik bekerja mandiri atau bekerja pada suatu perusahaan produksi/jasa dengan penghasilan yang semakin layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi serta dapat menghasilkan karya-karya yang unggul dan mampu bersaing di pasar global. Memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan, baik untuk diri sendiri maupun untuk anggota keluarganya. Mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dalam rangka mewujudkan keadilan pendidikan di setiap lapisan masyarakat. Kemampuan untuk mengelola sumberdaya alam, sosial, budaya dan lingkungan.

3. Proses Sosial

Dengan proses sosial dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh timbal balik antara berbagai bidang kehidupan bersama. Kehidupan bersama itu dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu dari segi ekonomi, kehidupan politik, hukum dan sebagainya. Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada aspek kehidupan ekonomi, yaitu dilihat dari peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ada di Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang dikemukakan di atas, dan secara

umum untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang upaya pembangunan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup di Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan. Secara Khusus Penelitian ini bertujuan :

- a. Memperoleh data dan informasi yang mendeskripsikan tentang keadaan masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan, yang meliputi latar belakang tingkat pendidikan, ekonomi, dan masalah-masalah yang terkait dalam kehidupan keseharian. Mendeskripsikan kondisi dan perubahan-perubahan yang dialami oleh masyarakat pada masa sebelum dan sesudah program pembangunan masyarakat yang dilakukan oleh Perum Perhutani tersebut diselenggarakan di Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan.
- b. Mengetahui dan mendeskripsikan program PHBM (Pembangunan Hutan Bersama Masyarakat) yang dilakukan Perum Perhutani BKPH Pangalengan yang dibantu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) cukup efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam rangka perwujudan konsep pembangunan Masyarakat yang berada di Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan.
- c. Memperoleh gambaran pelaksanaan program pembangunan (*community development*) terdapat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pada saat pelaksanaannya.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan objektif tentang proses pembangunan masyarakat (*community development*) guna meningkatkan kualitas hidup penduduk di Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan, dan juga sekaligus dapat mengukur keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini dapat bermanfaat :

- a. Sebagai bahan masukan bagi lembaga pemerintah khususnya Perum Perhutani untuk melihat keberhasilan dan kekurangan penyelenggaraan program *community development* yang dilakukan sebagai bahan gambaran untuk membuat program yang akan datang.
- b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan program pembangunan masyarakat (*community development*) yang dilakukannya.
- c. Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya, khususnya tentang efektifitas program *community development*.

E. Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi di negara berkembang memicu pertumbuhan angkatan kerja beberapa tahun kemudian secara umum hal ini dapat dianggap sebagai satu faktor positif yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Apabila jumlah tenaga kerja yang semakin banyak akan menambah jumlah tenaga kerja yang produktif,

maka pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara ekonomi permasalahan tidak akan terjadi karena semua kebutuhan sudah terpenuhi.

Akan tetapi pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi juga menjadi salah satu faktor negatif dalam pembangunan ekonomi, karena pada negara yang sedang berkembang hal tersebut dapat menimbulkan masalah baku misalnya keterbelakangan, karena tingkat penghasilan yang rendah. Rendahnya tingkat hidup dalam bentuk tidak tercukupinya kebutuhan pokok, kesehatan, dan jaminan sosial yang rendah, serta kurangnya pendidikan inti pokok dari kemiskinan dan satu sama lainnya saling berhubungan. Pendapatan yang rendah disebabkan karena produktivitas tenaga kerja yang rendah, rendahnya produktivitas akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan yang buruk, tingginya pertumbuhan penduduk dan tingginya pengangguran, hal ini dapat seakan diistilahkan sebagai sebuah "lingkaran setan".

Untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat tersebut perlu dilakukan upaya terpadu yang dilakukan oleh pemerintah misalnya dengan pola pembangunan masyarakat (*community development*). Margono Slamet (1978 : 1-3) mengemukakan bahwa:

Isaian ditinjau dari segi pembangunan, adalah adanya kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang diinginkan. Adanya suatu situasi baru yang diinginkan tetapi tidak tercapai juga menimbulkan ada masalah. Indonesia menginginkan gerakan reformasi dapat menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi, tetapi tidak berhasil, tentu ada masalah. Di dalam kegiatan pembangunan Desa, masalah akan muncul secara terus menerus dan dalam bentuk yang bermacam-macam. Penyebabnya, juga

berbeda sehingga diperlukan proses identifikasi masalah untuk menentukan mana yang prioritas, yang mudah dipecahkan dan yang sulit dipecahkan.

Dasar proses pembangunan adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya yang sangat luas dan berguna serta kemauan mereka untuk menjadi lebih baik. Proses pembangunan masyarakat ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, mengoptimalkan sumberdaya setempat sebaik mungkin, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Melalui proses pembangunan masyarakat diharapkan akan dikembangkan lebih jauh pola pikir yang kritis dan sistematis.

Proses pembangunan sangat bermanfaat untuk Dinas dan Instansi lain dalam peningkatan pelayanan yang lebih tanggap bagi kebutuhan pelanggan yang telah diidentifikasi oleh masyarakat sendiri. Proses pembangunan masyarakat akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhannya kepada instansi-instansi pemberi pelayanan. Dengan demikian, instansi dapat menyesuaikan serta memperbaiki pelayanannya.

Arthur Dunham (1956:3) seorang pakar *Community Development* merumuskan definisi *community development* itu sebagai berikut.

Organized efforts to improve the conditions of community life, and the capacity for community integration and self-direction. Community Development seeks to work primarily through the enlistment and organization of self-help and cooperative efforts on the part of the residents of the community, but usually with technical assistance from government or voluntary organization.

Rumusan di atas menekankan bahwa pembangunan masyarakat merupakan usaha-usaha yang terorganisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat untuk mampu bersatu dan mengarahkan diri sendiri. Pembangunan masyarakat bekerja terutama melalui peningkatan dari organisasi-organisasi swadaya atau LSM dan usaha-usaha bersama dari individu-individu di dalam masyarakat, akan tetapi biasanya dengan bantuan teknis baik dari pemerintah maupun organisasi-organisasi sukarela. Gde Pitana (Denpasar Post Kamis, 26 Februari 2004) menyatakan bahwa "Pembangunan masyarakat tidak boleh diartikan sebagai pemberian kebebasan tak terbatas kepada masyarakat untuk berbuat di daerahnya masing-masing. Bagaimanapun besarnya keinginan untuk memberikan keleluasaan terhadap masyarakat setempat".

Sebagai suatu lembaga Perum Perhutanni mempunyai beberapa target diantaranya adalah kelestarian fungsi sosial (Makalah oktober 2004) :

Terjaminnya keberlanjutan fungsi perusahaan hutan bagi kehidupan masyarakat setempat yang tergantung kepada hutan, baik langsung atau tidak langsung, secara lintas generasi. Pada dasarnya prinsip kelestarian sosial tersebut mencakup lima kondisi, yang dapat diformulasikan dalam bentuk aksi sebagai : (1) menghormati atau mengakui kawasan (berarti juga kejelasan batas) yang merupakan/digunakan sebagai ruang kehidupan/penghidupan masyarakat lokal (terutama masyarakat adat); (2) mempertahankan peran masyarakat lokal dalam pengendalian (baca:kontrol) atas sumberdaya hutan yang diusahakan; (3) menjaga keberlangsungan aktifitas/tradisi sosio-kultural masyarakat lokal berkaitan dengan sumberdaya lokal

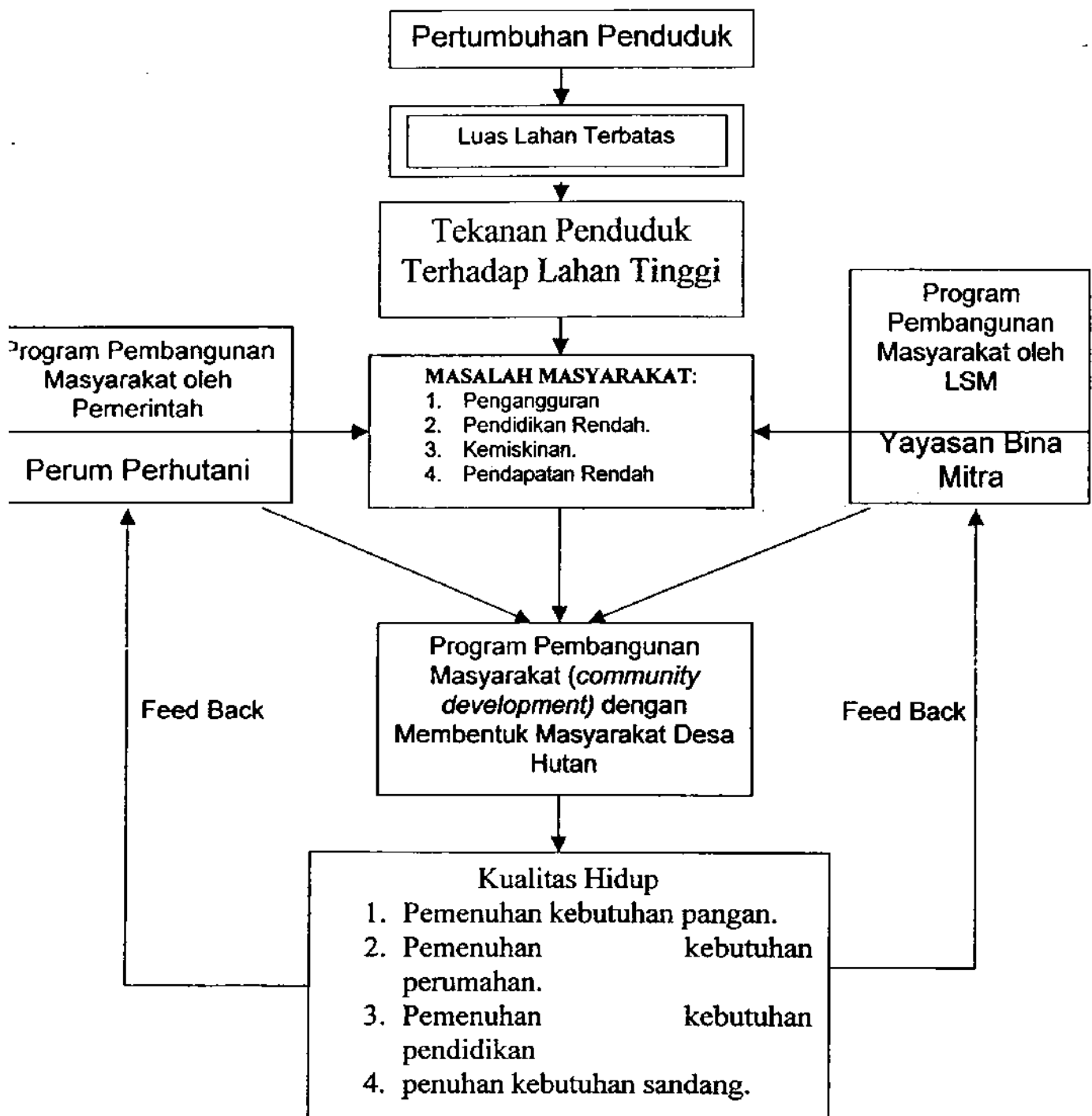
untuk terlibat/berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengusahaan sumberdaya hutan; serta (5) menghindar dan/atau menyelesaikan secara "manusiawi" berbagai proses sosial dan interaksinya yang bersifat disosiatif (merugikan) berkaitan dengan pengusahaan hutan dan keberadaan/kepentingan masyarakat lokal.

Menurut Ditto Santoso (Republika Jum'at 3 September 2004)

"Pendekatan *community development* seringkali muncul sebagai sebuah aksi berbasis masyarakat (*community based action*) dalam menyikapi krisis yang dihadapi atau adanya peluang untuk meningkatkan kualitas hidupnya". Masyarakat merasa perlu untuk mengambil tindakan terhadap apa yang telah terjadi. Sebagai contoh masyarakat yang berada di wilayah Teluk Buyat yang mengangkat masalah yang dihadapi, menyuarakan kondisinya yang terabaikan dan menjadi korban pencemaran lingkungan. Kualitas hidup yang diharapkan adalah adanya peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan, pemenuhan kebutuhan perumahan, pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kebutuhan sandang.

Apabila kondisi sebagaimana dicontohkan diatas dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan pendekatan *community development*. Hal lain yang berpotensi menjadi pendorong antara lain masalah sosial seperti tingginya tingkat pengangguran di desa dan kekurangmampuan dalam mengelola bantuan dari pemerintah. Hal tersebut telah dilakukan oleh Perhutani Kabupaten Bandung yang menggunakan konsep PHBM (Pembangunan Hutan Bersama Masyarakat) dan membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) yang terdiri

dari masyarakat sekitar hutan yang kurang diuntungkan dalam proses pengelolaan hutan, dan mengurangi kerusakan hutan. Mereka didampingi untuk dapat menumbuhkan tanggung jawab atas kelestarian hutan dan menyatukan diri dalam usaha sosial- ekonomi untuk meningkatkan kesejahterannya. Lebih lanjut dapat digambarkan dalam paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 1
Paradigma Penelitian